

Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Penanggulangan Covid -19 di Kabupaten Nias Selatan

¹Jhon Firman Fau, ²Marselino Wau

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis

^{1,2}Universitas Nias Raya

^{1,2}Nias, Indonesia

jhontelda@gmail.com, waumarselino561@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Dikirim : 18/06/2022

Diterima : 22/06/2022

Diterbitkan : 28/06/2022

ABSTRAK

Covid-19 merupakan peristiwa atau fenomena yang jarang terjadi, dampaknya tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia tetapi juga sangat mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk Indonesia dan Kabupaten Nias Selatan pada khususnya. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengikuti arahan dari pusat untuk memfokuskan kembali anggaran untuk penanganan COVID-19. Dalam menjalankan implementasi kebijakan Covid -19 di Kabupaten Nias Selatan, setiap Operasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah khususnya dalam pemotongan anggaran operasional perangkat daerah (OPD). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang pengambilan datanya menggunakan teknik observasi, observasi dokumen, dan wawancara dengan informan yang memiliki hubungan dengan kebijakan anggaran. Hasil penelitian menemukan bahwa dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten Nias Selatan, penerima manfaat sangat terbantu dan dapat menghemat pengeluaran rumah tangga .

Kata kunci: Kebijakan, Refocusing, dan Anggaran

I. PENDAHULUAN

Virus Corona atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia. Sektor ritel terpukul di beberapa negara, terutama yang diisolasi atau dikunci, karena toko-toko tutup. Presiden Joko Widodo mengungkapkan dua pasien pertama di Indonesia dengan status positif Covid-19 pada Senin, 2 Maret 2020 Tetangga bergegas ke toko untuk membeli sembako setelah mengetahui bahwa kedua pasien itu berasal dari Depok dan bekerja di Jakarta. Orang-orang mulai ketakutan karena semakin banyak orang yang sakit setelah ditemukan, dan jumlah orang yang terinfeksi setelah terdeteksi terus meningkat, mengakibatkan kematian dari semua wilayah, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang dihantui oleh penyebaran virus tersebut, yang menyebabkan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh berbagai Pemerintah Daerah di Tanah Air (PSBB). Kerugian agregat nasional adalah kerugian yang paling mudah diukur. Selain itu, sebagai bagian dari respon terhadap Covid-19, pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan. Berbagai jenis kegiatan di lingkungan pemerintahan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah ..

Nias Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 yang mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengesahkan sikap anggaran APBD , di mana 328 miliar dialokasikan untuk layanan publik dasar. Optimalisasi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memenuhi belanja operasional penanganan COVID-19 diharapkan sebagai dampak dari realokasi dan sentralisasi pengelolaan

keuangan. Selanjutnya, dengan adanya wabah COVID-19, pemerintah daerah diharapkan memperkuat pelayanan publik sebagai bentuk bantuan dan kehadiran pemerintah dalam menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi masyarakat (Rabbani, 2020).

Selama wabah COVID-19, seluruh aspek organisasi, termasuk Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, mengalami pergeseran aktivitas. Hingga saat ini, pemerintah fokus pada kebangkitan ekonomi masyarakat melalui pelayanan publik dan alokasi APBD yang mengutamakan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

II. STUDI LITERATUR

Pandemi covid19

Covid-19 merupakan kejadian atau fenomena langka yang pengaruhnya tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia tetapi juga berdampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia dan Kabupaten Nias Selatan pada khususnya, yang akan menjadi fokus kajian skripsi ini. Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, terjadi perubahan perilaku manusia serta bagaimana anggaran negara dan daerah diperlakukan dalam menghadapi tantangan ekonomi. Covid-19 merupakan suatu kejadian atau fenomena yang jarang terjadi, dampaknya tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia tetapi juga sangat mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk Indonesia dan Kabupaten Kepulauan Nias Selatan khususnya yang akan menjadi bagian dari lokasi penelitian dalam skripsi ini. Akibat dari pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan baik dari segi perilaku manusia maupun dari segi perlakuan anggaran negara dan daerah dalam menghadapi masalah ekonomi. sejauh ini baru 1 (satu) yang ditemukan. jurnal penulisan literatur dari luar negeri yang ditulis oleh Charles C Blankart dan Gerrit B Koester (2009) dari Humboldt University Berlin dalam jurnal mereka yang berjudul *Refocusing The EU Budget – An Institutional View*. Eropa (European Economic Community) memfokuskan kembali anggaran belanja terkait perubahan belanja pertanian dan redistributif untuk mengurangi dan mengalihkan belanja pada belanja barang publik. Ada perdebatan antara kebijakan keuangan Masyarakat Ekonomi Eropa mengenai refocusing anggaran dan diskusi yang paling penting di antara pembuat kebijakan saat ini adalah dua proposal politik untuk reformasi anggaran: berdasarkan "Laporan Sapir" (diprakersai oleh Komisi Eropa) dan "Boege Laporan" (diprakersai oleh Komisi Eropa). European Parliament) European Economic Community Organization sendiri dibentuk pada tahun 1957 melalui perjanjian Roma dan pada tahun 2009 dilebur menjadi Uni Eropa dengan tujuan awal memperkenalkan integrasi ekonomi dengan melibatkan 6 (enam) negara antara lain Belgia, Prancis, Italia, Luksemburg, Belanda, dan Jerman Barat (Wikipedia: 2020).

Kesimpulan yang penulis ambil berdasarkan perdebatan dan pendapat dalam jurnal Charles C Blankart dan Gerrit B Koester (2009) bahwa terdapat perubahan kesepakatan dalam kesepakatan pengelolaan anggaran, dan fenomena perubahan kesepakatan ini terkait terhadap perubahan perilaku dalam menghadapi perubahan perkembangan ekonomi dan keuangan yang terjadi di masyarakat. Uni Eropa

Teori Pemfokusan Ulang Anggaran

Kondisi yang mengungkapkan pengaruh Covid-19 yang cukup besar terhadap perekonomian bahkan ditengarai dapat menyebabkan kemerosotan ekonomi. Akibat dari keadaan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah keputusan hukum berdasarkan kebijakan yang ditujukan untuk memerangi pandemi Covid-19.

Salah satunya adalah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /atau Ancaman. Yang Membahayakan Stabilitas Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Kehadiran undang-undang tersebut kemudian membawa dampak, baik secara substantif maupun prosedural dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah kebijakan pengelolaan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah yang mengalami beberapa transformasi terutama dalam konteks refocusing dan realocation yaitu re- sentralisasi dan transfer APBD (Anggaran Anggaran). Opini Belanja Daerah)

Teori Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan, menurut (Murti et al., 2021), adalah ukuran kinerja berdasarkan data keuangan. Analisis kinerja keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sebelumnya dengan menjalankan berbagai analisis untuk menghasilkan posisi keuangan yang mencerminkan realitas entitas serta kinerja masa depan yang prospektif. 2018 (Mardiasmo) Kinerja keuangan merupakan ukuran pengelolaan keuangan organisasi dalam kaitannya dengan pusat pertanggungjawaban. .

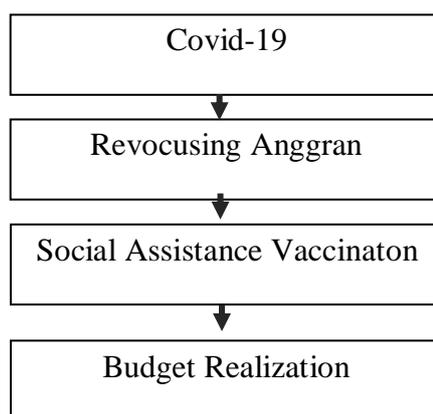
Refocusing dan Realokasi APBD dalam Tinjauan Pengelolaan Keuangan Daerah

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, juga menjadi acuan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 330 UU Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan adanya ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyiapan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Gubernur, bupati/walikota, dan DPRD provinsi, kabupaten, atau kota merupakan pemain penting dalam menentukan arah dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah agar berjalan stabil.

METODE

Bentuk yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini untuk memusatkan perhatian pada permasalahan atau fenomena yang ada dan mampu menggambarkan dengan baik fakta-fakta di lapangan sehingga peneliti memberikan informasi apa adanya.

Sedangkan menurut (Zuriah, 2006) penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta, atau peristiwa secara sistematis dan akurat mengenai sifat karakteristik penduduk atau daerah tertentu. Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini akan memberikan gambaran nyata bagaimana adopsi kebijakan oleh daerah dilakukan sebagai salah satu cara untuk merealisasikan kebijakan lain di atasnya, yang dalam hal ini adalah kebijakan sertifikasi guru. Metode deskriptif tidak terbatas pada pengumpulan data, tetapi juga analisis dan interpretasi data dan cenderung tidak perlu mencari atau menjelaskan hubungan dan menguji hipotesis .



Gambar 1. Sumber Penelitian

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL

Nias Selatan adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara yang terletak di pulau Nias . Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nias Selatan tahun 2021 jumlah penduduk kabupaten ini adalah 360.531 jiwa (2020), dengan kepadatan penduduk 145 jiwa/km ² . Ibukota

Nias Selatan adalah Telukdalam . Nias Selatan sebelumnya merupakan bagian dari Nias Kabupaten . Status otonomi diperoleh pada 25 Februari 2003, dan diresmikan pada 28 Juli 2003. Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 104 gugusan pulau besar dan kecil. Letak pulau-pulau tersebut memanjang sejajar dengan pulau Sumatera. Panjang pulau-pulau itu kurang lebih 60 kilometer, lebarnya 40 kilometer. Dari keseluruhan gugusan pulau terdapat empat pulau besar yaitu Pulau Tanah Bala (39,67 km²), Pulau Tanah Masa (32,16 km²), Pulau Tello (18 km²), dan Pulau Pini (24,36 km²). Tidak seluruh pulau berpenghuni. Penduduk Nias Selatan tersebar di 21 pulau di 35 kecamatan

Data penelitian

BPKPAD /2020 tanggal 22 Februari 2021 tentang penggunaan sebagian (*penandaan*) dana lokasi umum atau dana bagi hasil untuk mendukung pendanaan vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19)

Tidak	Nama Perangkat Daerah	Jumlah pemfokusan ulang/penyesuaian untuk dukungan vaksinasi Covid-19	Penambahan plafon OPD untuk dukungan Vaksinasi Covid-19
1	Dinas Pendidikan	Rp. 11.389.590.520,-	-
2	Dinas Kesehatan	Rp. 5.830.000.000,-	Rp. 17.519.590.520,-
3	Departemen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 500.000.000,-	-
4	layanan sosial	-	Rp. 3.000.000.000,-
5	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	-	Rp. 3.000.000.000,-
6	Departemen Pertanian	Rp. 1.000.000.000,-	-
7	Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah	Rp. 6.036.362.000,-	-
8	desa pasar telukdalam	Rp. 381.819.000,-	-
9	desa pasar pulau batu	Rp. 381.819.000,-	-
Jumlah		Rp. 25.519.590.520,-	Rp. 25.519.590.520,-

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan melakukan kegiatan vaksinasi yang melibatkan aparat antara lain TNI, POLRI, SATPOL PP, dan masyarakat.
2. Selama pandemi COVID-19, pemerintah memberikan bantuan tunai kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi COVID-19, antara lain masyarakat miskin, pekerja informal, dan pelaku usaha. Secara ekonomi, penyediaan BLT berdampak sangat signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat. dan kepada kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan usaha dan meminimalisir dampak pemutusan hubungan kerja (PHK), namun dari segi sosial dapat memicu gejolak berupa konflik. Konflik dapat berupa konflik horizontal akibat kecemburuan dan ketidakharmonisan antar masyarakat, dan konflik vertikal karena sebagian pihak akan menuduh pemerintah tidak adil dan tidak tepat dalam menyalurkan bantuan. BLT juga menimbulkan konflik di tingkat keluarga. Selain dampak munculnya konflik, dampak lainnya adalah pemicu terjadinya korupsi.

3. Pemerintah membantu masyarakat dalam bentuk sembako untuk membantu perekonomian yang sedang lesu akibat bencana non alam yaitu Covid-19

VII. REFERENSI

- Basri, YM, & Gusnardi, G. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus di Pemrov Riau). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* , 4 (1), 33–48. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9803>
- Eko Budi Lestari. (2021). Implementasi Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 Selama Pandemi Covid-19 Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *VISIONERS: Jurnal Pemerintah Daerah di Indonesia* , 13 (3), 593–606. <https://doi.org/1054783/jv.v13i3.478>
- Fitra, H. (2014). Analisis Pendapatan Daerah Pada Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran. *Jurnal WRA* , 2 (1), 369–386. journal.up.ac.id/index.php/wra/article/download/6150/4774
- Harinoto, H. (2015). Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013. *MODERNIZED Economic Journal* , 11 (1), 28. <https://doi.org/10.21067/jem.v11i1.867>
- Jamroni. (2021). Jurnal Kepedulian Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) - Aphelion* , 3 (September), 207–212. <http://jurnal.global.kesehatan.sciencegroup.com/index.php/JPM>
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi 2018. Di *Penerbit Andi* .
- Murti, LE, Sopanah, A., & Hasan, K. (2021). Evaluasi Refocusing dan Realokasi Anggaran Kinerja Bbcp Surabaya Tahun Anggaran 2020. *Musyawarah Nasional Widyagama Ekonomi dan Bisnis (W EB)*, 2 (1), 577–584.
- Rabbani, DRS (2020). Periksa proses membingungkan dan realokasi APB. *Strategi Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Mempelajari Proses Refocusing dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19* , 4, 59–78. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12321>
- Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi: Pengembangan Media Ilmu dan Praktik Administrasi* , 17 (2), 273–290. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.608>
- Silalahi, DE, & Ginting, RR (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jessa (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* , 3 (2), 156-167. <https://doi.org/10.36778/jesy.v3i2.193>
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabet.
- Sugiyono. (2012). *Pengertian Penelitian Kualitatif* . Alfabet.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. *Jurnal Ekonomi Kelautan* , 1 (1), 12–21.
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Skripsi Bisnis*. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Zulfa, IM, & Yunitasari, FD (2021). Edukasi Generasi Muda Siap Vaksinasi Covid-19 *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita* , 1 (2), 100-112. <https://doi.org/10.33759/asta.v1i2.149>
- Zuria, N. (2006). *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori Aplikasi* . Sastra Bumi.